

## **Skema Pembiayaan Aktivitas Ekonomi di Lahan Suboptimal untuk Mendukung Restorasi Gambut**

### ***Financing Schemes for Economic Activities in Suboptimal Land to Support Peatland Restoration***

**Nur Arifatul Ulya<sup>1\*)</sup>** Efendi Agus Waluyo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang

<sup>\*)</sup> Tel./Faks. +62711414864

email: nurarifatululya@gmail.com

#### **ABSTRACT**

Suboptimal land in the form of peatlands in Ogan Komering Ilir District is currently in degraded condition. The Government of Indonesia through the Peat Restoration Agency (PRA) uses the 3 R scheme for restoration of degraded peatlands. Peatlands restoration activities have main goal not only to improve the condition of peatlands ecosystems but also to drive the local economy. Peatlands restoration-based economic activities have the potential to encourage local communities to be more empowered and prosperous and to invite the investors to support regional economic development. Economic activities based on peatland restoration are costly, so that it needs funding support both for community (especially local farmers) and for investors. Hence they can play an active role and get more benefit. This paper reviews the financing scheme of economic activities based on peatland restoration. Governments can provide policies and programs as a form of financing of peat restoration-based economic activities. Financial services institutions can play a role in financing through KUR schemes, sharia banking and revolving funds. Restoration-based economic activities related to infrastructure development can utilize financing schemes through PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

---

Keywords: bank, credit, empowerment, farmer

#### **ABSTRAK**

Lahan suboptimal berupa lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir saat ini dalam kondisi terdegradasi. Pemerintah Indonesia melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) menggunakan skema 3 R untuk restorasi lahan gambut yang rusak. Kegiatan restorasi gambut mempunyai tujuan selain perbaikan kondisi ekosistem gambut, juga berpeluang menjadi penggerak perekonomian lokal. Kegiatan perekonomian berbasis restorasi gambut berpotensi mendorong masyarakat lokal semakin berdaya dan sejahtera serta mengundang investor untuk berinvestasi dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian wilayah. Aktivitas ekonomi berbasis restorasi gambut memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga diperlukan dukungan pembiayaan agar masyarakat (terutama petani lokal) maupun dunia usaha dapat berperan aktif dan memperoleh manfaat. Tulisan ini mengkaji skema pembiayaan aktifitas ekonomi berbasis restorasi gambut. Pemerintah dapat memberikan kebijakan dan program sebagai bentuk pembiayaan aktivitas ekonomi berbasis restorasi gambut. Lembaga jasa keuangan dapat berperan dalam pembiayaan melalui skema KUR, perbankan syariah dan dana bergulir. Aktivitas ekonomi berbasis

*Editor: Siti Herlinda et. al.*

*ISBN : 978-979-587-748-6*

restorasi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dapat memanfaatkan skema pembiayaan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Kata kunci: bank, kredit, pemberdayaan, petani lokal

## PENDAHULUAN

Luas daratan Indonesia yang mencapai 189,1 juta ha sebagian besar termasuk lahan suboptimal (Baliklimat, 2003). Lahan suboptimal dapat dikelompokkan menjadi empat tipologi lahan yaitu lahan kering masam, lahan kering iklim kering, lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak dan lahan gambut (Puslitbangtanak, 2000). Sumatera Selatan merupakan provinsi kedua di Pulau Sumatera dengan lahan gambut seluas 1.262.385 hektar yang merupakan 19,61% luasan lahan gambut di Sumatera (Sofyan Ritung, Wahyunto, Kusumo Nugroho, Sukarman, Hikmatullah, Suparto, 2011). Adapun Mulyani & Sarwani (2013) menyatakan bahwa terdapat lahan suboptimal tipologi gambut di Sumatera Selatan seluas 1.262.385 hektar (terluas kedua di Pulau Sumatera dan terluas kelima di Indonesia).

Tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum lapuk (Hardjowigeno & Abdullah, 1987). Sementara menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2014 gambut didefinisikan sebagai material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.

Tipologi rawa meliputi sekitar 75% wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang terletak di pantai timur Provinsi Sumatera Selatan. Sekitar 85 persen dari luas lahan rawa gambut yang terdapat di Kabupaten OKI merupakan kawasan hutan (Remark Asia, 2017). Meskipun luas, lahan gambut di Kabupaten OKI saat ini dalam kondisi terdegradasi.

Perubahan kondisi lahan gambut di OKI yang formasi alaminya berupa hutan alam rawa gambut menjadi menjadi kawasan budidaya jenis yang tidak adaptif lahan gambut merupakan salah satu pemicu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia (Chokkalingam et al., 2004). Aktivitas budidaya di lahan gambut selama ini dilakukan dengan pembangunan saluran drainase yang masif untuk menurunkan tinggi muka air tanah agar sesuai untuk pertumbuhan tanaman budidaya yang sebenarnya merupakan jenis komoditas lahan kering. Lahan gambut yang terdegradasi mengalami kekeringan, subsidensi yang akhirnya menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang dengan skala yang semakin besar. Pengeringan dan konversi lahan kontributor dalam peningkatan intensitas kabut asap dari kebakaran tahun 2015, dimana sekitar 33 persen dari jumlah lahan yang terbakar merupakan lahan gambut (Adriani et al., 2016).

Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk memperbaiki lahan suboptimal tipologi gambut yang sudah terdegradasi melalui restorasi gambut. Restorasi gambut diharapkan memperbaiki kondisi lahan gambut agar sesuai dengan sifat alaminya yang basah, ditumbuhi oleh vegetasi adaptif lahan gambut seiring dengan revitalisasi sumber penghidupan masyarakat (terutama petani lokal) yang tinggal di lahan gambut.

Restorasi gambut mempunyai tujuan utama untuk memperbaiki ekosistem gambut. Agar kegiatan perbaikan ekosistem gambut secara biofisik yang berupa pembasahan (*rewetting*) dan penanaman embali (revegetasi) dapat berjalan dengan baik, diperlukan kondisi pemungkin berupa revitalisasi penghidupan masyarakat lokal. Masyarakat yang berdaya dan sejahtera melalui aktivitas ekonomi berbasis restorasi gambut diharapkan dapat mendukung restorasi gambut. Skema restorasi ini merupakan sinergi antara kepentingan konservasi dan ekonomi.

Restorasi gambut memerlukan dukungan berbagai pihak yang saling bersinergi. Masyarakat memerlukan bantuan dari aspek kebijakan, kelembagaan maupun pembiayaan agar dapat berperan aktif dalam aktivitas perekonomian berbasis restorasi gambut. Aspek pembiayaan mempunyai peranan yang penting dalam mendukung peranan masyarakat, terutama dalam penyediaan modal dan dana segar guna mendukung aktivitas perekonomian berbasis restorasi gambut. Sementara sebagian masyarakat (terutama petani lokal) belum terbiasa dengan skema pembiayaan yang digunakan oleh lembaga jasa keuangan. Sebagian masyarakat di wilayah pedesaan di masih memilih sumber pendanaan atau pinjaman dari lembaga informal seperti rentenir atau sistem arisan untuk membiayai aktivitas ekonomi.

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji berbagai skema pembiayaan aktivitas perekonomian berbasis restorasi gambut melalui lembaga jasa keuangan. Aktivitas ekonomi berbasis restorasi merupakan peluang bagi lembaga jasa keuangan untuk berperan dalam restorasi gambut untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Ruang lingkup wilayah kajian dari penelitian ini adalah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun aktivitas perekonomian yang dikaji dibatasi pada aktivitas perekonomian yang terkait dengan restorasi gambut dengan skema 3R (*rewetting*, revegetasi, dan revitalisasi mata pencaharian masyarakat).

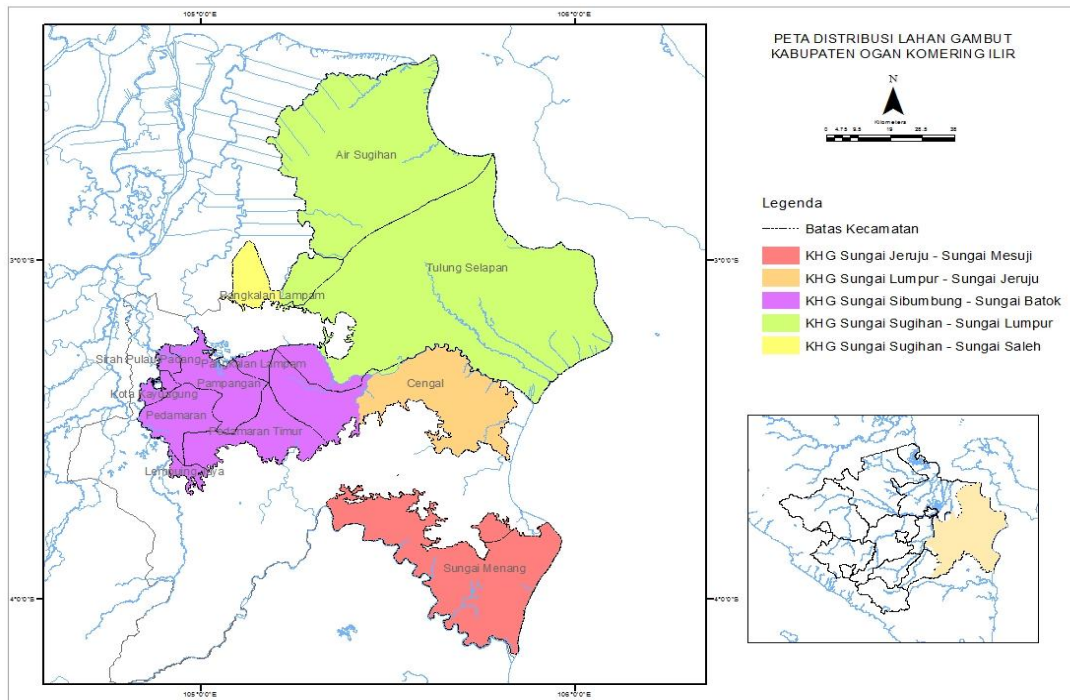
Metode yang dilakukan dalam penyusunan makalah ini adalah studi pustaka. Pustaka yang dikaji berupa hasil-hasil penelitian, data statistik dan publikasi terkait dengan kajian yang dilakukan. Hasil studi pustaka selanjutnya digunakan untuk menyusun skema pembiayaan aktivitas perekonomian berbasis restorasi gambut.

## **LAHAN SUB OPTIMAL DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Lahan suboptimal di Provinsi Sumatera Selatan berupa lahan kering maupun lahan rawa dengan luas total 8.554.341 ha. Lahan suboptimal berupa lahan kering masam di Provinsi Sumatera Selatan seluas 5.176.944 ha. Lahan suboptimal berupa lahan rawa terdiri dari rawa pasang surut (1.007.178 ha), rawa lebak (1.262.385 ha) dan rawa gambut (829.398 ha) (Mulyani & Sarwani, 2013).

Lahan suboptimal dengan formasi lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan 51,8% dari keseluruhan lahan gambut di Sumatera Selatan (Wahyunto, Ritung, Suparto, & Subagjo, 2004). Pada saat ini lahan gambut di kabupaten OKI dalam kondisi terdegradasi, terutama disebabkan oleh pengelolaan yang tidak memperhatikan karakteristik alami gambut dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang. Kabupaten OKI menjadi target prioritas pertama untuk perencanaan dan pelaksanaan restorasi tahun 2016 oleh BRG, bersama dengan Kabupaten Pulang Pisau (Provinsi Kalimantan Tengah), Kabupaten Musi Banyuasin (Provinsi Sumatera Selatan), serta Kabupaten Kepulauan Meranti (Provinsi Riau).

Lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdistribusi dalam lima wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yaitu KHG Sungai Jeruju-Sungai Mesuji, KHG Sungai Lumpur Sungai Sugihan, Singai Sibumbang-Sungai Batok, Sungai Sugihan-Sungai Lumpur dan KHG Sungai Sugihan-Sungai Saleh. Terdapat 11 kecamatan yang berada di wilayah KHG, yaitu Kecamatan Cengal, Sungai Menang, Kota Kayu Agung, Lempuing Jaya, Pampangan, Pangkalan Lampam, Pedamaran, Pedamaran Timur, Sirah Pulau Padang, Tulung Selapan dan Kecamatan Air Sugihan. Distribusi lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir disajikan pada Gambar 1 dan Tabel 1.



Gambar 1. Peta distribusi lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tabel 1. Distribusi kesatuan hidrologi gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir

No.	Kubah Gambut	Luas (Ha)
1.	KHG Sungai Jeruju - Sungai Mesuji	151.841,08
2.	KHG Sungai Lumpur - Sungai Jeruju	90.794,66
3.	KHG Sungai Sibumbang - Sungai Batok	205.027,65
4.	KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur	634.898,31
5.	KHG Sungai Sugihan - Sungai Saleh	20.169,79
Jumlah		1.102.731,48

Penggunaan lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagian besar berupa Hutan Tanaman Industri (HTI), diikuti oleh semak belukar dan rawa, dan semak belukar. Ketiga penggunaan lahan tersebut mencapai 807.779,36 ha (73,26%) luas lahan gambut di Kabupaten OKI. Lahan gambut Kabupaten OKI saat ini sebagian besar dikelola oleh perusahaan besar, yaitu HTI dan perkebunan kelapa sawit. Terdapat 3 perusahaan HTI di KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur, Sungai Sugihan-Sungai Saleh dan Sungai Lumpur-Sungai Jeruju. Perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagian besar berada di KHG Sungai Sibumbang-Sungai Batok, Sungai Sugihan-Sungai Saleh dan Sungai Sugihan-Sungai Lumpur.

### SEKTOR PERTANIAN SEBAGAI PENGGERAK UTAMA PEREKONOMIAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ilir terutama digerakkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Tabel 2). Sektor konstruksi menduduki peringkat kedua.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2015

Sektor Usaha	Rp. ( x 000)	(%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.905.788,4	64,1
Pertambangan dan Penggalian	205.034,1	1,0
Industri Pengolahan	977.377,7	4,9
Pengadaan Listrik dan Gas	5.384,0	0,0
Air, Limbah dan Daur Ulang	3.174,0	0,0
Konstruksi	2.223.578,9	11,0
Perdagangan	1.501.565,2	7,5
Transportasi dan Pergudangan	104.833,0	0,5
Akomodasi	124.202,9	0,6
Informasi dan Komunikasi	68.711,6	0,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	205.845,5	1,0
Real Estate& Jasa Perusahaan	301.607,7	1,5
Admin Pemerintahan	1.092.139,2	5,4
Jasa Pendidikan	295.746,0	1,5
Jasa Kesehatan	29.145,3	0,1
Jasa lainnya	89.374,5	0,4
<b>Jumlah</b>	<b>20.133.508,0</b>	

Sumber: Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam angka tahun 2016, diolah

Komoditas utama sektor pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, palawija dan hortikultura. Komoditas jagung dan ubi kayu merupakan komoditas unggulan tanaman pangan lain. Tanaman sayuran yang diusahakan di Kabupaten OKI terdiri dari bawang merah, cabai, ketimun, terung dan petsai. Tanaman buah-buahan yang dibudidayakan di Kabupaten OKI terdiri dari mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya dan nanas. Komoditas tanaman perkebunan utama di Kabupaten OKI terdiri dari karet, kelapa sawit dan kelapa. Perkebunan karet diusahakan oleh masyarakat. Kelapa sawit diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan sebagian oleh masyarakat. Kelapa ditanam oleh masyarakat. Sektor kehutanan di Kabupaten OKI sebagian besar berupa olahan bubur kayu dari hasil penanaman HTI.

### **AGROFORESTRI KOMODITAS RAMAH GAMBUT DAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT UNTUK OPTIMALISASI LAHAN SUB OPTIMAL**

Paludikultur merupakan teknik rehabilitasi dan restorasi lahan gambut dengan memulihkan kondisi gambut, melalui pembasahan gambut (menutup saluran drainase) dan penanaman jenis-jenis tumbuhan lokal (Joosten, Tapio-Biström, & Tol, 2012). Sementara Tata dan Susmianto (2016) menyatakan bahwa paludikultur merupakan salah satu teknik restorasi dan budidaya yang dapat dikembangkan dalam rangka untuk mengembalikan kelestarian ekosistem gambut dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar lahan gambut. Paludikultur mempunyai potensi untuk mengembalikan kondisi biofisik, fungsi ekologis, dan bahkan fungsi ekonomi dari ekosistem gambut (Biancalani & Avagyan, 2014; Tata & Susmianto, 2016).

Paludikultur dalam pelaksanaannya memerlukan jenis-jenis tumbuhan yang adaptif terhadap lahan gambut yang relatif masam dan tergenang. Jenis-jenis lokal (endemic) seperti sagu (*Metroxylon* spp.), nipah (*Nypa fruticans*), jelutung rawa (*Dyera polyphylla*), ramin (*Gonystylus bancanus*), meranti merah (*Shorea balangeran*), gemor (*Alseodaphne* spp. dan *Nothaphoebe* spp.), pulai rawa (*Alstonia pneumatophora*), gelam (*Melaleuca cajuputi*), dan beriang merupakan jenis-jenis tumbuhan untuk menghasilkan kayu maupun pangan yang dapat tumbuh dengan baik di lahan gambut tergenang. Beberapa tanaman palawija dan hortikultura dengan sistem perakaran pendek seperti jagung, singkong, dan nanas juga dapat tumbuh baik di lahan gambut dangkal dan tergenang dengan saluran air yang tertutup (Tata & Susmianto, 2016).

Jenis tumbuhan endemik lahan gambut baik tumbuhan berkayu maupun beberapa tanaman pangan dan palawija mempunyai peluang untuk dibudidayakan bersama dalam rangka restorasi lahan gambut. Sistem agroforestri dapat diterapkan untuk pelaksanaannya di tingkat tapak, sehingga dapat dicapai optimalisasi pemanfaatan lahan suboptimal formasi gambut. Nair (1993) menyatakan bahwa optimalisasi dalam agroforestri diperoleh karena: (1) bervariasinya produk yang dihasilkan (kayu, pangan, serat, jasa lingkungan); (2) memperkecil kegagalan panen karena kegagalan atau merosotnya harga panen dari salah satu komponen penyusun agroforestri dapat ditutupi oleh panen dari komponen penyusun lainnya; (3) stabilitas dan peningkatan pendapatan petani (satu paket input yang diberikan menghasilkan output yang bervariasi dan berkelanjutan). Paludikultur dengan sistem agroforestri sesuai dengan pendekatan 3R dalam restorasi gambut karena diterapkan di lahan gambut yang basah, terdapat aktivitas revegetasi dan mendorong revitalisasi penghidupan masyarakat. Budidaya tanaman tahunan (endemik lahan gambut, berkayu) dengan tanaman pangan dan palawija dapat meningkatkan output yang dihasilkan oleh lahan suboptimal baik dari aspek biososial maupun sosial ekonomi.

Pola agroforestri yang dapat diterapkan pada lahan gambut di Kabupaten OKI adalah tanaman pangan (padi dan jagung), tanaman hortikultura (nanas, pinang, kopi), dan tanaman kayu (gelam, beriang, jelutung). Pola agroforestri memungkinkan tercapainya optimalisasi pengelolaan lahan suboptimal. Optimalisasi secara biososial dilakukan dengan penerapan pola tanam multi strata. Optimalisasi secara sosial ekonomi diperoleh oleh masyarakat (petani lokal) melalui perolehan pendapatan dengan periode yang berbeda. Agroforestri di lahan gambut dapat memberikan penghasilan jangka pendek (tanaman pangan), jangka menengah (tanaman hortikultura) dan jangka panjang (tanaman kayu). Adanya penghasilan bererapa periode ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian petani lokal. Penerapan paludukultur dengan sistem agroforestri untuk restorasi lahan gambut juga mendorong berkembangnya aktivitas-aktivitas ekonomi (bisnis) berbasis restorasi gambut. Aktivitas ekonomi yang dilakukan dapat berbasis lahan (*land based business*) maupun tidak berbasis lahan (*non-land based business*).

Aktivitas ekonomi restorasi berbasis lahan berkaitan erat dengan usahatani untuk menghasilkan bahan baku industri pengolahan maupun bahan setengah jadi melalui pengolahan sederhana. Aktivitas berbasis lahan ini memberikan ruang kepada masyarakat atau petani lokal untuk mempraktekkan usahatani dalam rangka berperan aktif dalam restorasi ekosistem gambut dan memberdayakan perekonomian rumah tangga. Melalui aktivitas berbasis lahan petani lokal dapat menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan baik berupa bahan mentah maupun dengan proses pengolahan sederhana.

Dunia usaha dapat berperan baik pada *land-based business* maupun *non land-based business*. Aktivitas *land-based business* yang dapat dilakukan oleh dunia usaha meliputi budidaya, pemanenan, dan pengolahan hasil siap jual. Adapun aktivitas *non land-based business* meliputi pengolahan hasil, penyimpanan, pemasaran dan pembangunan

infrastruktur terkait industri. Aktivitas ekonomi berbasis restorasi yang dilakukan oleh dunia usaha diharapkan menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan perekonomian wilayah secara keseluruhan.

### **SKEMA PEMBIAYAAN AKTIVITAS EKONOMI DI LAHAN SUBOPTIMAL UNTUK Mendukung RESTORASI Gambut**

Peran aktif masyarakat terutama petani lokal dan dunia usaha dalam rangka restorasi gambut memerlukan dukungan baik dari pemerintah maupun lembaga jasa keuangan. Dukungan dari pemerintah dapat berupa kebijakan dan program. Lembaga jasa keuangan dapat memberikan dukungan pembiayaan, karena aktivitas ekonomi berbasis restorasi gambut merupakan jenis bisnis yang relatif baru, memerlukan biaya investasi yang besar, memiliki resiko yang besar dan kemungkinan pelaku bisnis tidak mampu untuk menanggung seluruh biaya investasi dengan modal sendiri. Partisipasi dari investor maupun kreditur menjadi sangat penting dalam membiayai aktivitas ekonomi berbasis restorasi gambut oleh masyarakat (petani lokal) maupun dunia usaha (swasta).

Pembiayaan bisnis restorasi oleh masyarakat (petani lokal) yang bersumber dari pemerintah dapat berupa pembiayaan melalui Bumdes, Badan Layanan Umum (BLU), maupun berbagai program pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian maupun lembaga non kementerian. Pembiayaan bisnis restorasi oleh masyarakat melalui lembaga jasa keuangan dimungkinkan bersumber dari lembaga perbankan dan lembaga non-perbankan seperti lembaga multilateral, maupun institusi pembiayaan yang dibentuk oleh pemerintah. Skema pembiayaan aktivitas berbasis restorasi gambut yang memungkinkan antara lain berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), pendanaan syariah, dana bergulir dan skema pembiayaan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

#### **Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada perbankan dengan pola penjaminan. Penyaluran KUR untuk bisnis restorasi gambut dapat dilakukan dengan tiga skema, yaitu :

a. Skema 1, penyaluran kredit individu (petani)

KUR disalurkan secara langsung dari bank kepada masyarakat (petani) yang merupakan pelaku bisnis restorasi gambut. Dipandang dari aspek penyaluran dana pinjaman, skema ini paling mudah sebab tidak banyak pihak yang terlibat dalam penyaluran kredit. Skema ini lebih sesuai untuk pelaku bisnis restorasi yang termasuk dalam kategori *land based business*, terutama petani lokal.

b. Skema 2, penyaluran kredit melalui kelompok tani (gabungan kelompok tani)

Bank menyalurkan KUR kepada kelompok tani atau gapoktan, selanjutnya disalurkan pada individu (petani) anggota kelompok tani atau gapoktan. Skema ini memfungsikan kelompok tani atau gapoktan sebagai *channelling*, tidak ada keterlibatan pihak di luar kelompok tani atau gapoktan. Resiko kegagalan ditanggung oleh pihak perbankan dan petani, tetapi kredibilitas dari kelompok tani atau gapoktan juga akan menjadi pertaruhan. Skema ini mendorong terjadinya kebersamaan diantara masyarakat (petani) pelaku bisnis restorasi dalam suatu kelompok tani/gapoktan. Keberadaan kelompok ini selanjutnya akan memperkuat posisi tawar kelompok baik dalam pengadaan sarana produksi, pemasaran, memperoleh program-program baik dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Namun demikian, pola ini memerlukan dilakukannya rekayasa sosial termasuk penguatan kelembagaan masyarakat (petani) sebagai pelaku bisnis restorasi gambut.

*Editor: Siti Herlinda et. al.*

*ISBN : 978-979-587-748-6*

c. Skema 3, pelibatan pemerintah daerah dalam hal pendampingan dan penjaminan.

Pemerintah daerah di lokasi bisnis restorasi gambut dalam pendampingan dan penjaminan. Pendampingan yang diberikan dapat berupa pendampingan teknis dan pemasaran. Adapun penjaminan yang bisa diberikan pemerintah daerah adalah penjaminan kesesuaian penggunaan kredit, *collateral*, dan penjaminan bila terjadi kredit macet. Fungsi pendampingan dan penjaminan oleh pemerintah daerah diharapkan memberikan perbaikan dari aspek teknis dan pemanfaatan dana dapat dilakukan secara benar dan optimal. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Bisnis restorasi gambut memberikan ruang kepada masyarakat (petani, pengrajin) untuk berperan sebagai pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai fungsi strategis.

Sari (2013) menyatakan bahwa setelah menerima KUR, perkembangan usaha mikro kecil di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan yang signifikan terhadap omzet penjualan, keuntungan, dan jumlah jam kerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa KUR efektif di dalam membantu pengembangan usaha. Sementara Mochtar (2008) dalam penelitiannya mengenai pengembangan penyaluran kredit melalui koperasi dapat peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat di kota Pekanbaru. Bank Bukopin melalui swamitra menerapkan empat konsep antara lain pemberdayaan ekonomi rakyat melalui dukungan teknis, pemasaran dan pembiayaan melalui kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi. Skema pendanaan dengan KUR diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat (petani lokal) dan pembangunan perekonomian wilayah. Ketiga skema KUR dapat mendukung aktivitas ekonomi berbasis restorasi gambut terutama yang dilakukan oleh petani lokal. Meskipun demikian, masyarakat (petani lokal) perlu mendapatkan pendampingan maupun peningkatan pengetahuan dan kapasitas agar dapat mengakses KUR secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan.

### **Pendanaan Syariah**

Pendanaan bisnis restorasi gambut juga dimungkinkan berasal dari pendanaan syariah. Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan dengan periode waktu pendek atau panjang. Pendanaan modal kerja syariah memungkinkan untuk aktivitas ekonomi berbasis restorasi gambut karena mempunyai cakupan yang luas, mulai dari tambahan modal untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli material untuk bahan baku, perdagangan barang dan jasa sampai pengerjaan proyek yang sedang berjalan. Skema pembiayaan syariah yang dapat diterapkan untuk mendukung bisnis restorasi gambut terdiri dari skema pembiayaan jual beli (*murabahah*), skema kerja sama (*musyarakah*), dan skema bagi hasil (*mudharabah*).

a. Skema pembiayaan jual beli (*murabahah*)

Skema pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank syariah dengan nasabah (pelaku bisnis restorasi gambut). Bank membeli barang yang dibutuhkan terkait dengan proyek bisnis restorasi gambut, kemudian menjualnya kepada pemilik bisnis restorasi gambut sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

b. Skema kerja sama (*musyarakah*)

Pembiayaan kerja sama (*musyarakah*) digunakan untuk modal kerja. Dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha dan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati. Wujud dari pembiayaan ini dapat berupa uang tunai atau aset yang likuid dan tidak boleh digunakan untuk memberikan pinjaman ke pihak ketiga. Mekanisme pengembalian pinjaman fleksibel sesuai dengan realisasi pendapatan usaha.

*Editor: Siti Herlinda et. al.*

ISBN : 978-979-587-748-6



Kontrak perjanjian mencantumkan kema pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Skema bagi hasil (*mudharabah*).

Pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) merupakan pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah yang merupakan pelaku bisnis restorasi gambut ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Bank dapat membiayai total kebutuhan modal usaha nasabah. Angsuran pengembalian pinjaman dapat berubah-ubah sesuai tingkat *revenue* atau realisasi usaha (*revenue sharing*).

**Dana Bergulir (*revolving fund*)**

Dana bergulir (*revolving fund*) merupakan dana yang khusus dipersiapkan oleh pemerintah untuk kegiatan tertentu dalam rangka menunjang pembiayaan investasi jangka panjang dan dikelola oleh lembaga khusus. Dana bergulir disalurkan melalui perbankan/lembaga keuangan/koperasi ke UKM strategis, koperasi simpan pinjam atau koperasi jasa keuangan syariah. UKM yang dikategorikan UKM strategis adalah yang berorientasi ekspor, komoditas unggulan daerah dan menyerap tenaga kerja. Aktivitas ekonomi berbasis restorasi gambut berpotensi untuk menjadi UKM strategis. *Land based business* dengan agroforestri tanaman kayu dengan tanaman pangan dan tanaman hortikultura menghasilkan komoditas pertanian unggulan daerah yang diikuti dengan proses pengolahan menghasilkan produk ekspor dan menyerap tenaga kerja. Dengan skema dana bergulir diharapkan petani lokal dan dunia usaha yang bergerak dalam aktivitas ekonomi berbasis restorasi gambut bertambah jumlahnya dan beragam usahanya.

Skema dana bergulir berupa pinjaman diberikan oleh pemerintah untuk menutup biaya investasi awal kegiatan bisnis restorasi gambut. Hasil dari bisnis restorasi gambut digunakan untuk mengembalikan pinjaman kepada lembaga pengelola dana bergulir. Dana yang berhasil dikembalikan akan digunakan untuk membiaya proyek-proyek terkait bisnis restorasi gambut. Skema pembiayaan yang ditawarkan melalui dana bergulir biasanya berupa pinjaman dengan bunga rendah dan dengan jangka waktu pengembalian yang panjang jika dibanding dengan pembiayaan komersial.



Gambar 2. Skema dana bergulir bisnis restorasi gambut (Frankfurt School-UNEP, 2012 dimodifikasi)

Skema pinjaman dana bergulir dilaksanakan pada pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) berdasarkan Keputusan Kepala Pusat P2H No.01/Pusat P2H-1/2008), yang dilaksanakan secara berkelompok (Permenhut No. P9/Menhut-II/2008). Petani harus membentuk kelompok tani dengan persyaratan minimal terdiri dari 5 anggota dan masing-masing anggota minimal memiliki areal IUPHHK-HTR seluas 8 ha untuk memperoleh Pinjaman Dana Bergulir HTR (PDB-HTR) (Nugroho, 2011). Pengalaman HTR dan keberadaan aktivitas ekonomi berbasis restorasi gambut yang strategis dari aspek ekologi dan ekonomi memungkinkan penerapan skema pembiayaan aktivitas ekonomi berbasis restorasi gambut dengan dana bergulir.

### **Skema pembiayaan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)**

Skema pembiayaan untuk *non-land based business* restorasi gambut biasanya memerlukan biaya yang lebih besar dan terkait dengan pembangunan infrastruktur. Skema pembiayaan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) merupakan salah satu sumber pendanaan yang memungkinkan untuk diterapkan. Pemerintah mendirikan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rangka melakukan percepatan pembangunan infrastruktur nasional dengan menarik dana-dana swasta baik dari dalam maupun luar negeri untuk membantu pembangunan infrastruktur Indonesia. SMI mengembangkan berbagai pembiayaan proyek, diantaranya adalah Pinjaman Senior Pinjaman *subordinasi/Mezzanine*, pinjaman *convertible*, investasi ekuitas, pembiayaan kontrak, dan pembiayaan *invoice*.

#### 1. Skema pembiayaan dengan *Subordinated Loan Facility*

PT. SMI bersama-sama dengan Bank menyediakan pinjaman dengan skema *subordinated loan facility* dalam bisnis restorasi gambut. Skema ini memungkinkan bank menyediakan share pinjaman lebih besar untuk bisnis restorasi gambut untuk mendukung skala usaha yang lebih besar maupun cakupan usaha yang lebih besar baik untuk *land based business* maupun *non-land based business*.

#### 2. Skema pembiayaan dengan *Equity Investment*

Skema ini memungkinkan pelaku bisnis restorasi gambut bekerja sama dengan PT. SMI dalam pengadaan kebutuhan modal. Adapun kekurangan modal selanjutnya dapat diperoleh dari pinjaman kepada bank (OJK, 2015).

### **Implementasi Skema Pembiayaan**

Skema pembiayaan aktivitas ekonomi berbasis restorasi gambut dalam penerapannya tidak selalu berupa skema tunggal, bisa jadi berupa kombinasi skema. Sebaiknya tidak menggunakan hanya satu pilihan skema pendanaan, karena kebutuhan petani beragam. Ejigu (2009) dan Nugroho (2011) menyatakan bahwa skema tunggal (*one size fit all*) dan hanya berorientasi pada pembangunan tanaman mempersempit pilihan-pilihan bagi petani di satu sisi dan berisiko menurunkan kualitas portofolio. Demikian pula dengan aktivitas ekonomi dalam rangka mendukung restorasi gambut. Skema pendanaan yang dipilih tergantung kepada pelaku aktivitas ekonomi berbasis restorasi gambut, dalam artian apakah memiliki kapasitas yang cukup atau tidak dalam implementasinya.

Masyarakat (petani lokal) sebagian tidak terbiasa dengan lembaga jasa keuangan dan terkendala oleh tata cara permohonan pembiayaan yang kompleks dan jauhnya lokasi pengurusan pinjaman. Akibatnya, rentan terjadi biaya yang tidak sesuai sasaran dan transaksi tinggi. Sementara (Nugroho, 2011) menyatakan bahwa pemberian akses pendanaan untuk pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat di Sudan dan Uganda dapat

meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, meningkatkan ketersediaan mata pencaharian masyarakat dari sektor kehutanan, dan pengentasan kemiskinan. Demikian pula, aktivitas ekonomi dalam rangka mendukung restorasi gambut dengan perbaikan kondisi ekosistem gambut sekaligus menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dengan dukungan pendanaan dari lembaga jasa keuangan dan pendampingan petani lokal untuk memungkinkan tercapainya tujuan yang dimaksud.

## KESIMPULAN

Pemerintah dan Lembaga Jasa Keuangan dapat berperan dalam mendukung restorasi gambut melalui dukungan terhadap aktivitas ekonomi berbasis restorasi gambut. Skema pembiayaan melalui LJK yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi berbasis restorasi gambut adalah KUR, perbankan syariah, dana bergulir dan pembiayaan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur. Skema yang diterapkan untuk aktivitas ekonomi bisa jadi tidak berupa skema tunggal, tetapi dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan di tingkat lapangan. Diperlukan pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat terutama petani lokal sebagai pemungkin tercapainya optimalisasi ekologi dan ekonomi lahan suboptimal formasi gambut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan pada JICA yang memberikan dukungan pendanaan penelitian tahun 2017 dan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang atas dukungan kerjasama penelitian. Makalah ini didedikasikan untuk Almarhum Prof. Dr. Ir. Robiyanto H. Susanto sebagai ketua Konsorsium Perguruan Tinggi-Litbang LHK Palembang yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, M., Moye, S., Ahmad, M., Kendrick, A., Wood, George Henry Stirrett Mileva, E., Harimurti, P., & Farman, M. (2016). *The cost of fire. An economic analysis of Indonesia's 2015 fire crisis. Indonesia Sustainable Landscape Knowledge Note:1* (Vol. 17). Jakarta.
- Baliklimat. (2003). *Atlas Sumberdaya Iklim Pertanian Indonesia Skala 1: 1.000.000*. Bogor: Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat,.
- Biancalani, R., & Avagyan, A. (2014). *Towards climate-responsible peatlands management. Mitigation of Climate Change in Agriculture Series (MICCA)*. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i4029e.pdf>
- Chokkalingam, U., Suyanto, Permana, R. P., Kurniawan, I., Mannes, J., Darmawan, A., ... Susanto, R. H. (2004). Pengelolaan Api, Perubahan Sumberdaya Alam dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Masyarakat di Areal Rawa/Gambut-Sumatera Bagian Selatan. In Suyanto, U. Chokkalingam, & P. Wibowo (Eds.), *Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera: Masalah dan Solusi* (pp. 35–46). Bogor.
- Ejigu, L. (2009). Performance analysis of a sample microfinance institutions of Ethiopia. *International NGO Journal Vol. 4 (5), Pp. 287-298, May, 2009, 4(5), 287–298*. <http://doi.org/10.2139/ssrn.1398167>
- Hardjowigeno, S., & Abdullah. (1987). Suitability of peat soils of Sumatra for agricultural

- development. In *Symposium on Tropical Peat and Peatland for Development*. Yogyakarta: International Peat Society.
- Joosten, H., Tapio-Biström, M.-L., & Tol, S. (2012). *Peatlands - guidance for climate change mitigation through conservation, rehabilitation and sustainable use. Mitigation of Climate Change in Agriculture (MICCA) Programme series 5*. Retrieved from <http://www.fao.org/docrep/015/an762e/an762e.pdf>
- Mochtar, R. M. (2008). *Pengembangan Penyaluran Kredit melalui Koperasi dengan Pola Swamitra untuk Peningkatan Ekonomi Daerah dan Masyarakat di Kota Pekanbaru*. Institut Pertanian Bogor.
- Mulyani, A., & Sarwani, M. (2013). Karakteristik dan Potensi Lahan Sub Optimal untuk Pengembangan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 7(1), 47–55. <http://doi.org/http://dx.doi.org/10.2018/jsdl.v7i1.6429.g5724>
- Nair, P. K. (1993). *An Introduction to Agroforestry. An introduction to agroforestry* (Vol. 73). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. [http://doi.org/10.1016/0378-1127\(95\)90008-X](http://doi.org/10.1016/0378-1127(95)90008-X)
- Nugroho, B. (2011). Analisis Perbandingan Beberapa Skema Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Berbasis Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, XVII(2), 79–88. Retrieved from <http://ilkom.journal.ipb.ac.id/index.php/jmht/article/view/3980>
- OJK. (2015). *Pembiayaan Efisiensi Energi di Industri untuk Lembaga Jasa Keuangan 2015*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Puslitbangtanak. (2000). *Atlas Sumberdaya Lahan/Tanah Eksplorasi Indonesia Skala 1:1.000.000*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat.
- Remark Asia. (2017). *Studi Dampak Sosial PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan*. Bogor.
- Sari, S. A. W. (2013). *Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Boyolali*. Dipnegoro University.
- Sofyan Ritung, Wahyunto, Kusumo Nugroho, Sukarman, Hikmatullah, Suparto, C. T. (2011). *PETA LAHAN GAMBUT INDONESIA Skala 1:250.000*. Jakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.
- Tata, H. L., & Susmianto, A. (2016). *Prospek Paludikultur Ekosistem Gambut Indonesia*. Bogor: Forda Press.
- Wahyunto, Ritung, S., Suparto, & Subagjo. (2004). *Sebaran Gambut dan Kandungan Karbon di Sumatera dan Kalimantan*. Bogor.